

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK

Halaman 1

447 Temuan BPK Berindikasi Pidana

JAKARTA - Dalam kurun 2003 - 30 Juni 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 447 kasus berindikasi pidana senilai Rp 45,65 triliun.

Temuan itu telah dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Kamis (4/10).

Moermahadi bersama jajarannya datang untuk menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018. IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

Dalam siaran pers, BPK melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 4,13 triliun pada semester I 2018. Jumlah

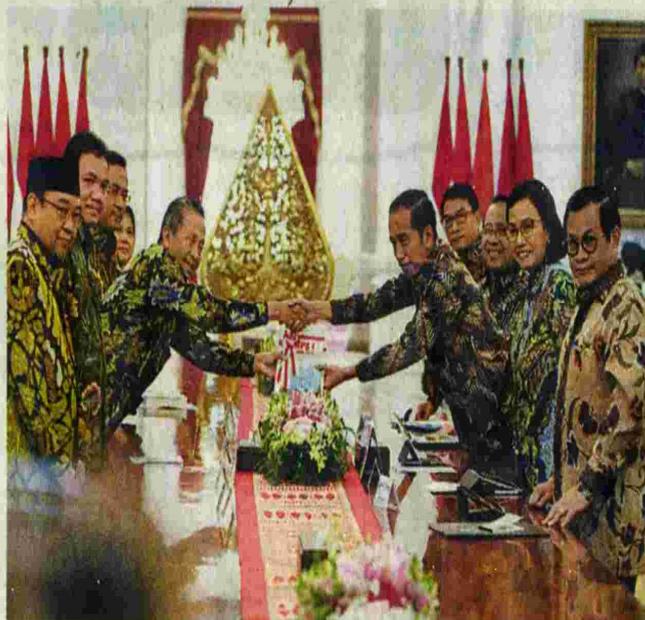
ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyeteron ke kas negara/daerah senilai Rp 697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp 2,88 triliun, serta koreksi *cost recovery* seni-

lai Rp 561,6 miliar.

"Penyeteron ke kas negara dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi kewajiban pelayanan publik (KPP) 2017. Terkait dengan koreksi *cost recovery*, ini merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," ungkap Moermahadi.

Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95 persen) senilai Rp 44,05 triliun.

Terkait LHP keuangan, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84 persen pada 2016 menjadi 91 persen pada tahun lalu. (A20-56)



SM/Antara

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN : Presiden Joko Widodo menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2018 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Jakarta, Kamis (4/10). (55)